

**ANALISIS PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN,  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI  
PAJAK MENGENAI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)  
DI KPP PRATAMA TELUK BETUNG**

***GUIDANCE ON BUSINESS PRODUCTIVITY IMPROVEMENT PARTNERSHIP SMEs  
WHEAT FLOUR IN BANDAR LAMPUNG***

**Rasti Yulia dan Hertia**  
**Program Studi Manajemen, Akademi Perpajakan Tridharma**  
**[vitratin@prasetyamandiri.co.id](mailto:vitratin@prasetyamandiri.co.id)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Teluk Betung. Penelitian yang dilaksanakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 77 responden penelitian. Ada lima variabel dalam penelitian ini yaitu: 4 (empat) Variabel bebas (X) dan 1 (satu) variabel terikat dimana keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) sebagai variabel bebas (X) dan persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) sebagai variabel terikat. Terdapat pengaruh keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) secara bersama-sama (simultan) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) sebesar 49,9%.

**Kata Kunci** : Keadilan, sistem, pemahaman, sanksi, penggelapan pajak

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the influence of business partnership coaching on increasing productivity of small industry companies and other factors that affect productivity. The method used in this research is survey method and kuisoner with linear regression analysis using SPSS. Based on the results of this study it can be concluded that 46.7% increase in business productivity is influenced by business coaching while the remaining 53.3% is influenced by other factors..*

*Key words: partnership, productivity*

**PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, khususnya di bidang perekonomian, Negara Indonesia dituntut agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Sebagai Negara berkembang, Indonesia

membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber berasal dari sektor non migas, dimana pajak diandalkan menjadi komponen terbesar atas pendapatan Negara.

Soemitro (1992) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Hal serupa juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak sebagai kontribusi orang pribadi maupun badan kepada Negara, walaupun bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tetapi ini digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011).

Di Indonesia, usaha- usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi, 2012). Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan pajak. Sebagai salah satu sarana pengelolaan uang Negara, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan penduduk, guna mencapai peningkatan kesejahteraan penduduk.

Sejumlah program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan wujud pengelolaan ke uangan Negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang- Undang. Di dalam APBN, sumber penerimaan Negara terdiri dari dua, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Negara. Namun, penerimaan yang tergolong cukup besar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bila setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tetu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah

setiap tahunnya (Nugroho, 2012). Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia, baik dari segi sistem maupun sumber daya manusianya.

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan salah satu elemen utama dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Pada mulanya, Indonesia menganut *Official Assessment System*, namun sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System* yang menuntut para Wajib Pajak berperan aktif dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, melaporkan besaran pajak terutang dalam jangka waktu tertentu yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Pemerintah, melalui aparat perpajakan berperan sebagai pembina serta pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dengan berjalannya *Self Assessment System*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya di bidang perpajakan dan ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008).

Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1). Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya akan memicu timbulnya berbagai masalah perpajakan sebab dengan penerapan *Self Assessment System*, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang melalui mekanisme perencanaan perpajakan (*tax planning*) atau

bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini pula yang menjadi faktor penghambat utama bagi pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan sistem perpajakan serta melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada Wajib Pajak mengenai *Self Assessment System* sehingga tidak terjadi penyalahgunaan “celah” oleh Wajib Pajak.

Kecenderungan Wajib Pajak dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara disebabkan karena Wajib Pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba (kemampuan ekonomis) dan kenikmatan yang diperoleh atas kinerjanya. Mereka harus menisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak dapat dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, 2009).

Masyarakat kurang tertarik untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya karena tidak adanya timbal balik langsung dari Negara, serta pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat (Feld dan Frey, 2007). Ditambah lagi dengan buruknya administrasi perpajakan dan pemerataan hasil pajak yang disetor di Indonesia, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak serta pelayanan fiskus yang mengecewakan, membuat Wajib Pajak berusaha untuk mengelak dari kewajibannya. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam peraturan perpajakan (Arifianto, 2013). Perencanaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu; Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan Penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun keduanya bertujuan sama dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan, namun nyatanya memiliki perbedaan yang sangat kontras, dimana menurut Christian (2010), perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan

pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang berlaku.

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dari peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku di suatu Negara. Akibat sulitnya menerapkan *tax avoidance*, Wajib Pajak cenderung memutuskan untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar pajak (Ayu, 2009). Penyebab utama yang mendorong Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan, pengetahuan dan Keadilan Perpajakan yang luas untuk mengetahui seluruh peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi biaya pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Selama ini sudah banyak penelitian yang dilakukan dalam membahas fenomena penggelapan pajak (*tax evasion*) dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sisi keuangan, akuntansi, dan sektor publik. Namun, pada penelitian ini penulis akan berfokus pada penggelapan pajak dari sisi etika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel terikat seperti keadilan sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi persepsi akan penggelapan pajak. Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Suminarsasi (2012), Handyani (2014) dan Rahman (2013) terdapat hasil temuan yang tidak konsisten mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian tersebut. Perbedaan fokus penelitian ini terdapat pada variable independen, dimana penulis meneliti sanksi pajak dan pemahaman akan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : apakah persepsi wajib pajak

orang pribadi mengenai keadilan sistem perpajakan berpengaruh atas etika perilaku penggelapan pajak, apakah persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh atas etika perilaku penggelapan pajak, sejauh mana penggelapan pajak dapat dianggap etis dan kapan dianggap tidak etis.

### **Batasan Masalah.**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis pengaruh keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan (*tax evasion*).

### **Tujuan Penelitian**

untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika perilaku penggelapan pajak, untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika perilaku penggelapan pajak, untuk menganalisis kapan penggelapan pajak dapat dikatakan etis dan kapan tidak etis.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kuantitatif dengan penekanan pada pengukuran variabel yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Analisis kuantitatif kemudian digunakan untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden mengenai keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman akan pajak, sanksi perpajakan dan persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2010), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui sumber asli (tidak perantara) melalui pengisian kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis juga menggunakan data sekunder pada penelitian ini, yaitu data-data yang diambil dari literatur, artikel dan catatan

arsip (data dokumenter) sebagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Indikator yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Keadilan sistem perpajakan yang diterapkan
- 2) Kemampuan sistem perpajakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku
- 3) Kontrol (pengawasan) sistem perpajakan yang lemah terhadap kecurangan pajak
- 4) Kemudahan Wajib Pajak dalam memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu suatu persepsi yang dimiliki seorang Wajib Pajak akan etika penggelapan pajak. Indikator penggelapan pajak terdiri dari enam poin pertanyaan yang dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin, yaitu:

1. Pendeteksian perlakuan penggelapan pajak
2. Pengelolaan pajak yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Penegakan sanksi pajak yang tepat
4. Kinerja aparat perpajakan yang melakukan perbuatan curang meningkatkan keengganan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
5. Manfaat yang didapat dari Wajib Pajak atas pajak yang dibayarkan

Ketika responden memilih pilihan sangat setuju, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan sebagai perilaku yang tidak etis dilakukan dalam pajak.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden yaitu dengan menggunakan skala likert yang memiliki 5 tingkat preferensi jawaban dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS). Penelitian akan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program pengolah data SPSS versi 21.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan memaparkan fakta yang diperoleh dari penelitian. Dimana data yang diperoleh oleh penelitian ini diolah

dengan rumus atau ketentuan matematik/statistik, dengan merubah ke dalam bentuk simbol-simbol atau angka. Jawaban responden pada kuisisioner perlu dirubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang diperoleh. Efektivitas program kemitraan pada penelitian ini dilihat dari aspek pembinaan manajemen usaha, aspek bantuan modal dan aspek pemasaran pada UMKM berbasis tepung terigu di Kota Bandar Lampung. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan alat sttitika. Untuk melihat data penlitian ini valid atau tidak kuisisioner terlebih dahulu diuji dengan uji validitas, untuk melihat data reliabel atau tidak akan diuji dengan uji reliabilitas, dan untuk melihat tingkat kenormalan data akan diuji dengan uji normalitas. Untuk melihat hasil penelitian dalam menjawab hipotesisnya supaya hasilnya tidak bias maka hasil penelitian akan diujikan dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi = 5% (0.05)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data Uji Validitas

Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengukur apa yang perlu diukur dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Pada penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah *korelasi person*. Uji validitas digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing dengan skor total variabel. Selanjutnya angka korelasi yang dihasilkan akan dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$  yaitu 0,277 dari 77 responden. (Umar: 2005).

Dengan demikian berdasarkan uji validitas, suatu item pernyataan dikatakan valid apabila nilai  $r_{hitung}$  skor item terhadap skor totalnya di atas 0,277, atau dikatakan tidak valid apabila

nilai  $r_{hitung}$  item pernyataan tersebut lebih kecil dari 0,277. Oleh karenanya, semakin baik nilai koefisien *Korelasi Pearson* suatu item memperlihatkan semakin baik validitas item tersebut. Hasil keseluruhan dari pengujian validitas terhadap instrument pernyataan untuk variabel variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ), sanksi pajak ( $X_4$ ), dan persepsi pajak mengenai *tax evasion* (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Keadilan Perpajakan**

No	r hitung	r tabel	keterangan
x1	0,439	0,277	Valid
x2	0,317	0,277	Valid
x3	0,360	0,277	Valid
x4	0,610	0,277	Valid
x5	0,695	0,277	Valid
x6	0,759	0,277	Valid
x7	0,691	0,277	Valid

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa seluruh item skor pernyataan tentang Keadilan Perpajakan memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,277$ . Dengan nilai rata-rata  $r_{hitung} = 0,533$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai Keadilan Perpajakan tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
x1	0,685	0,277	Valid
x2	0,742	0,277	Valid
x3	0,720	0,277	Valid
x4	0,532	0,277	Valid
x5	0,519	0,277	Valid
x6	0,536	0,277	Valid

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa seluruh item skor pernyataan tentang Sistem Perpajakan memiliki nilai  $r_{hitung}$  0,622 lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,277. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai Sistem Perpajakan tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
x1	0,429	0,277	Valid
x2	0,820	0,277	Valid
x3	0,716	0,277	Valid
x4	0,565	0,277	Valid

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa seluruh item skor pernyataan tentang Pemahaman Perpajakan memiliki nilai  $r_{hitung}$  0,632 lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,277. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai Pemahaman Perpajakan tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
x1	0,655	0,277	Valid
x2	0,420	0,277	Valid
x3	0,387	0,277	Valid
x4	0,829	0,277	Valid
x5	0,757	0,277	Valid

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa seluruh item skor pernyataan tentang Sanksi Pajak memiliki nilai  $r_{hitung}$  0,609 lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,277. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai Sanksi Pajak tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas Tax Evasion**

No	r hitung	r tabel	Keterangan
----	----------	---------	------------

y1	0,591	0,277	Valid
y2	0,659	0,277	Valid
y3	0,483	0,277	Valid
y4	0,668	0,277	Valid
y5	0,660	0,277	Valid
y6	0,746	0,277	Valid

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa seluruh item skor pernyataan tentang Persepsi Pajak Tentang Tax Evasion memiliki nilai  $r_{hitung}$  0,634 lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,277. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai Persepsi Pajak Tentang Tax Evasion tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

### Uji Reabilitas

Penelitian ini di uji reabilitas dengan menggunakan program computer *SPSS versi 21 for windows*. Hasil pengujian reabilitas data dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach terhadap variabel-variabel pembinaan usaha dan peningkatan produktivitas disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Alpha-Cronbach	keterangan
Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,650	Reliabel
Sistem perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,656	Reliabel
Pemahaman perpajakan (x <sub>3</sub> )	0,785	Reliabel
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	0,628	Reliabel
Tax Evasion (Y)	0,707	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan (Tahun 2015) diolah

Berdasarkan tabel 7 diatas, diperoleh nilai *Alpha-Cronbach* pada variabel pembinaan usaha sebesar 0,839 dan variabel peningkatan produktivitas sebesar 0,656. Nilai *Alpha-*

*Cronbach* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, maka variabel penelitian ini dikatakan reliabel.

**Uji Normalitas**

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis:

- H0: Data residual terdistribusi normal
- HA: Data residual tidak terdistribusi normal

**Tabel 7. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,43618789
	Absolute	,086
Most Extreme Differences	Positive	,086
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,751
Asymp. Sig. (2-tailed)		,625

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,625 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

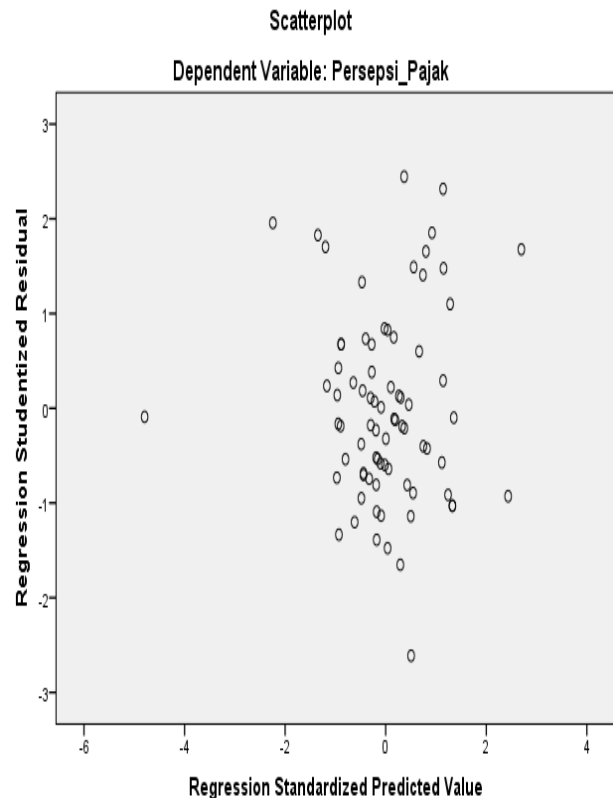
**Uji Heterokedasitas**

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya gejala heterokedasitas. Untuk mendeteksi terjadinya gejala heterokedasitas maka dilakukan dengan Grafik Scatterplot:

1. Jika terdapat pola tertentu pada Grafik Scatterplot SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskestisitas.

2. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas sert titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah hasil Uji Normalitas data Kolmogorov Smirnov menggunakan SPSS versi 21.



**Gambar 1 Grafik scatterplot**

**Dependent Variabel : Pembinaan Usaha**

Berdasarkan output Scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil Uji Heteroskedastisitas melalui Uji Glejser menggunakan SPSS versi 21.

**Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	8.715	2.003		6.216	.321

keadilan	.021	.043	1.566	3.866	.008
Sistem	.042	.025	1.433	1.110	.004
Pemahaman	.056	.053	2.377	1.756	.003
sanksi	.065	.056	2.112	1.347	.007
a. Dependent Variable: RES2					

Berdasarkan hasil output di atas diketahui bahwa nilai signifikan variabel Keadilan Perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel Keadilan Perpajakan ( $X_1$ ). Nilai signifikan variabel Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel Sistem Perpajakan ( $X_2$ ). Nilai signifikan variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ). Nilai signifikan variabel Sanksi Perpajakan ( $X_4$ ) sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel Sanksi Perpajakan ( $X_4$ ).

### Analisis Regresi Berganda

Analisis korelasi sederhana dilakukan dengan menggunakan program computer *SPSS versi 20.00 for windows*, adapun hasil perhitungannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 9. Hasil Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.529	2.910		4.305	.000
1	Keadilan_pajak	.303	.133	.330	2.275	.026

Sistem_pajak	.426	.140	.419	3.043	.003
Pemahaman_pajak	.323	.210	.206	1.542	.008
Sanksi_pajak	.106	.152	.083	.698	.005
a. Dependent Variable: Persepsi_pajak					

Berdasarkan tabel di atas, kemudian dimasukkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,529 + 0,303X_1 + 0,426X_2 + 0,323X_3 + 0,106X_4$$

1. Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Keadilan Perpajakan ( $X_1$ ) sebesar satu point, maka Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ *Tax Avesion* (Y) akan meningkat sebesar 0,303 point.
2. Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar satu point, maka Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ *Tax Avesion* (Y) akan meningkat sebesar 0,426 point.
3. Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) sebesar satu point, maka Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ *Tax Avesion* (Y) akan meningkat sebesar 0,323 point.
4. Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel Sanksi Perpajakan ( $X_4$ ) sebesar satu point, maka Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ *Tax Avesion* (Y) akan meningkat sebesar 0,106 point.

### Uji t

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai  $t_{hitung}$  3,856. Apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,666, maka  $t_{hitung}$  3,856 >  $t_{tabel}$  1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa; Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung dapat diterima. Jadi variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). Persamaan regresi keadilan perpajakan ( $X_1$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah  $Y = 12,389 + 0,337X_1$ , yang artinya setiap kenaikan satu point dari variabel



keadilan perpajakan akan diikuti oleh variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* sebesar 0,337 point.

**Tabel 10. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.389	2.017		6.141	.000
	keadilan	.337	.087	.316	3.856	.000

a. Dependent Variable: persepsi pajak

### Uji Koefisien Korelasi Berganda

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error the estimate
1	.316 <sup>a</sup>	.100	.093	5.361

Koefisien Determinasi (KD) = 0,100 x 100% = 10%. Dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 10%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/Tax Avesion

**Tabel 12. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.389	2.017		6.141	.000
	Sistem	.536	.086	.475	6.246	.000

a. Dependent Variable: persepsi pajak

1	(Constant)	10.362	1.595		6.496	.000
	Sistem	.536	.086	.475	6.246	.000

a. Dependent Variable: persepsi pajak

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai  $t_{hitung}$  6,246. Apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,666, maka  $t_{hitung}$  6,246 >  $t_{tabel}$  1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa; Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung dapat diterima. Jadi variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). Persamaan regresi sistem perpajakan ( $X_2$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah  $Y = 10,362 + 0,536X_2$ , yang artinya setiap kenaikan satu point dari variabel sistem perpajakan akan diikuti oleh variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* sebesar 0,536 point.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh koefisien determinasi sistem perpajakan ( $X_2$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error the estimate
1	.475 <sup>a</sup>	.225	.220	4.973

Koefisien Determinasi (KD) = 0,225 x 100% = 22,5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 22,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/Tax Avesion

**Tabel 12. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.625	1.385		4.782	.000
1 Sistem	.667	.067	.653	9.985	.000

a. Dependent Variable: persepsi pajak

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai  $t_{hitung}$  9,985. Apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,666, maka  $t_{hitung}$  9,985 >  $t_{tabel}$  1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa; Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung dapat diterima. Jadi variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). Persamaan regresi pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah  $Y = 6,625 + 0,667X_3$ , yang artinya setiap kenaikan satu point dari variabel pemahaman perpajakan akan diikuti oleh variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* sebesar 0,667 point.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh koefisien determinasi pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error the estimate
1	.653 <sup>a</sup>	.427	.422	4.279

Koefisien Determinasi (KD) =  $0,427 \times 100\% = 42,7\%$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) menjelaskan

variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 42,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/Tax Avesion**

**Tabel 14. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.923	1.377		5.029	.000
1 Sanksi	.805	.082	.647	9.834	.000

a. Dependent Variable: persepsi pajak

Berdasarkan hasil Uji t didapat nilai  $t_{hitung}$  9,834. Apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 yaitu 1,666, maka  $t_{hitung}$  9,834 >  $t_{tabel}$  1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa; Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung dapat diterima. Jadi variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). Persamaan regresi sanksi perpajakan ( $X_4$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah  $Y = 6,923 + 0,805X_4$ , yang artinya setiap kenaikan satu point dari variabel sistem perpajakan akan diikuti oleh variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* sebesar 0,805 point.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh koefisien determinasi sanksi perpajakan ( $X_4$ ) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error the estimate
1	.647 <sup>a</sup>	.419	.415	4.307

Koefisien Determinasi (KD) =  $0,419 \times 100\% = 41,9\%$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 41,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### Uji F

**Tabel 16. Hasil Uji F**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2134.459	2	533.615	32.599	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2144.357	74	16.369		
	Total	4278.816	76			
a. Dependent Variable: persepsi pajak						
b. Predictors (Constans): sanksi, keadilan, sistem, pemahaman						

Berdasarkan hasil penghitungan uji hipotesis secara simultan diperoleh F hitung sebesar 32,599 dan F tabel dengan signifikan 0,05 dari 77 responden adalah 3,122. Jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan yang menyatakan terdapat pengaruh keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah dapat diterima berdasarkan hasil penelitian di atas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh koefisien determinasi keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) secara bersama-sama (simultan) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error the estimate
1	.706 <sup>a</sup>	.499	.484	4.046

Koefisien Determinasi (KD) =  $0,499 \times 100\% = 49,9\%$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 49,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Keadilan Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ Tax Evasion (Y) berdasarkan hasil Uji Hipotesis Parsial, terbukti dari t hitung yang dihasilkan sebesar 3,856 dan lebih besar dari t tabel sebesar 1,666. Koefisien determinasi sebesar 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan perpajakan ( $X_1$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 10%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
2. Terdapat pengaruh Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ Tax Evasion (Y) berdasarkan hasil Uji Hipotesis Parsial,

terbukti dari  $t$  hitung yang dihasilkan sebesar 6,246 dan lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 6,246. Koefisien determinasi sebesar 22,5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ tax evasion ( $Y$ ) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 22,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

3. Terdapat pengaruh Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ Tax Evasion ( $Y$ ) berdasarkan hasil Uji Hipotesis Parsial, terbukti dari  $t$  hitung yang dihasilkan sebesar 9,985 dan lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,666. Koefisien determinasi sebesar 42,7% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ tax evasion ( $Y$ ) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 42,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
4. Terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_4$ ) terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak/ Tax Evasion ( $Y$ ) berdasarkan hasil Uji Hipotesis Parsial, terbukti dari  $t$  hitung yang dihasilkan sebesar 9,834 dan lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,666. Koefisien determinasi sebesar 41,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ tax evasion ( $Y$ ) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 41,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
5. Terdapat pengaruh keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) secara bersama-sama (simultan) terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ tax evasion ( $Y$ ) berdasarkan hasil Uji Hipotesis Simultan, terbukti dari  $F$  hitung yang dihasilkan sebesar 32,599 dan lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 3,122. Koefisien determinasi sebesar 49,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

keadilan perpajakan ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak/ tax evasion ( $Y$ ) pada KPP Pratama Teluk Betung sebesar 49,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

## SARAN

Adapun saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel keadilan perpajakan, yang perlu mendapat perhatian adalah indikator pada pernyataan No.6 yaitu penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting karena nilai indikator tersebut yang paling rendah. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peningkatan indikator ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran membayar pajak.
2. Variabel sistem perpajakan, yang perlu mendapat perhatian adalah indikator pada pernyataan No.1 yaitu penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang diterapkan bersifat tidak adil karena nilai indikator tersebut yang paling rendah. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peningkatan indikator ini adalah sebaiknya penerapan peraturan wajib pajak diterapkan yang berkeadilan.
3. Variabel pemahaman perpajakan, yang perlu mendapat perhatian adalah indikator pada pernyataan No.4 yaitu masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya karena nilai indikator tersebut yang paling rendah. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peningkatan indikator ini adalah agar penyuluhan – penyuluhan terhadap wajib pajak harus selalu disosialisasikan, untuk apa kegunaan pajak, siapa yang berhak membayar pajak dan bagaimana cara menghitung besaran pajaknya.
4. Variabel sanksi perpajakan, yang perlu mendapat perhatian adalah indikator pada pernyataan No.3 yaitu Wajib Pajak dikenai

sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar karena nilai indikator tersebut yang paling rendah. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peningkatan indikator ini adalah agar penyuluhan – penyuluhan terhadap wajib pajak harus selalu disosialisasikan, bagaimana cara mengisi SPT dan cara melaporkan SPT. Selama ini tidak semua masyarakat tahu bagaimana peran mereka terhadap pajak.

5. Variabel sanksi perpajakan, yang perlu mendapat perhatian adalah indikator pada pernyataan No.5 yaitu menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi karena nilai indikator tersebut yang paling rendah. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peningkatan indikator ini adalah sebaiknya besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, Moh. 1995, *Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donelly, 1999, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses I*. (Terjemahan), Nunuk Adiarni, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat belas, BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ishak dan Tanjung (2003). *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Kerlinger. 2000. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*. Edisi 3. Cetakan 7. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Mangkunegara, A. A. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Ranupandojo, Heidjrahman dan Suad Husnan, 2002, *Manajemen Personalialia*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Rivai (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Robbins, 1996. *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Robin dan Judge, 2007. *Teori-teori Motivasi*, , BPFE, Yogyakarta.
- Santosa, Budi, Purbayu dan Ashari. 2005. *Analisis Statistika dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Samsudin (2005). *Manajemen Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Siagian, P, Sondang. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sihombing, Umberto. 2005. *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Produktifitas, Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soejono. 1997. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2004. *Statistik Untuk Penelitian*. Cetakan 4. Bandung: Alfabeta.
- Samsudin, Abin, 2005, *Manajemen Kinerja*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Terry, GR. 1993. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta :Liberty
- Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta :PT. Gramedia dan Jakarta Business Research Center.
- Uyanto, S, Stanislaus. 2006. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wursanto. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara